

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TA 2024

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024

BALAI VETERINER BUKITTINGGI

018.06.0800.239523.KD

Jl Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM 14
Baso, Agam



**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024**

Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bukittinggi, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drh. Gigih Tri Pambudi, MM
NIP. 19661017.199403.1.001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - C.1.2. Piutang Bukan Pajak
 - C.1.3. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Aset Lainnya
 - C.3.1. Aset Tak Berwujud
 - C.3.2. Aset Lain-lain
 - C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
 - C.4. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1. Uang Muka dari KPPN
 - C.4.2. Utang Kepada Pihak Ketiga I
 - C.4.3. Utang yang Belum Ditagihkan
 - C.5. Ekuitas
 - C.5.1. Ekuitas
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat
 - D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk / Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bukittinggi, 30 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drh. Gigih Tri Pambudi, MM
NIP. 19661017.199403.1.001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 436.501.512,00 atau mencapai 40,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.100.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp 4.331.752.689,00 atau mencapai 45% dari alokasi anggaran sebesar Rp 9.647.576.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 35.961.660.095,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 363.698.704,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 35.596.952.446,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 1.008.945,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.602.994.666,00 dan Rp. 35.358.665.429,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 426.665.775,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 6.939.581.498,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp -6.512.915.723,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp. 10.135.681,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp -6.502.780.042,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 36.876.372.072,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp.-6.502.780.042,00

kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4.985.073.399,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp 35.358.665.429,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 JUNI 2024 dan 30 JUNI 2023**

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2024		% thn Angg	30 JUNI 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.100.000.000	436.501.512	40	347.379.006
JUMLAH PENDAPATAN		1.100.000.000	436.501.512	40	347.379.006
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	4.877.351.000	2.647.850.690	52	2.531.194.134
Belanja Barang	B.4	4.770.225.000	1.683.901.999	76	3.644.612.636
Belanja Modal	B.5	-	-	0	101.010.000
JUMLAH BELANJA		9.647.576.000	4.331.752.689	45	6.276.816.770

II. NERACA

BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI
NERACA
PER 30 JUNI 2024 dan 31 DESEMBER 2023

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	142.000.000	-
Piutang bukan pajak	C.1.2	299.944	-
Persediaan	C.1.3	221.398.760	883.335.354
Persediaan belum diregister	C.1.4	-	-
Jumlah Aset Lancar		363.698.704	883.335.354
ASET TETAP			
Tanah	C.2.1	22.829.600.000	22.829.600.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	46.150.034.207	44.593.145.318
Gedung dan Bangunan	C.2.3	11.315.877.500	11.315.877.500
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	903.834.150	903.834.150
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	80.232.500	80.232.500
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	(45.682.625.911)	(43.730.707.556)
Jumlah Aset Tetap		35.596.952.446	35.991.981.912
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	6.115.000	6.115.000
Aset Lain-Lain	C.3.2	1.651.000	1.651.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(6.757.055)	(6.711.194)
Jumlah Aset Lainnya		1.008.945	1.054.806
JUMLAH ASET		35.961.660.095	36.876.372.072
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada pihak ketiga	C.4.1	355.467.266	-
Utang yang belum ditagihkan	C.4.2	105.527.400	-
Uang muka dari KPPN	C.4.3	142.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		602.994.666	-
JUMLAH KEWAJIBAN		602.994.666	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	35.358.665.429	36.876.372.072
JUMLAH EKUITAS		35.358.665.429	36.876.372.072
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		35.961.660.095	36.876.372.072

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 dan 30 JUNI 2023**

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	426.665.775	341.828.948
JUMLAH PENDAPATAN		426.665.775	341.828.948
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.948.617.956	2.814.046.434
Beban Persediaan	D.3	668.671.954	2.196.965.297
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.126.306.006	1.175.478.377
Beban Pemeliharaan	D.5	626.628.413	586.077.075
Beban Perjalanan Dinas	D.6	84.459.620	1.109.032.405
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	2.587.500
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1.484.897.549	1.505.882.681
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	-	-
JUMLAH BEBAN		6.939.581.498	9.390.069.769
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.512.915.723)	(9.048.240.821)
KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	10.135.681	5.892.150
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		10.135.681	5.892.150
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		10.135.681	5.892.150
SURPLUS/DEFISIT LO		(6.502.780.042)	(9.042.348.671)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 dan 30 JUNI 2023**

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
EKUITAS AWAL	E.1	36.876.372.072	40.686.074.071
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6.502.780.042)	(9.042.348.671)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.985.073.399	5.929.437.764
KENAIKAN PENURUNAN EKUITAS	E.5	(1.517.706.643)	(3.112.910.907)
EKUITAS AKHIR	E.6	35.358.665.429	37.573.163.164

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi

Berdiri tahun 1972 dengan nama Laboratorium Kesehatan Hewan Bukittinggi Type C, tahun 1974 meningkat menjadi Laboratorium type B, Berdasarkan SK Mentan No. 315/Kpts/Org/V/1978 tanggal 25 Mei 1978 menjadi Balai Penyidikan Penyakit Hewan Wilayah II Bukittinggi dengan wilayah kerja 4 provinsi yaitu : Sumatera Barat, Riau, dan Jambi . Selanjutnya berdasarkan SK mentan No. 457/Kpts/OT.210/VIII/2001 pada tanggal 20 Agustus 2001 berubah menjadi Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner. Sejak tanggal 24 Mei 2013 berdasarkan Permentan No. 54/Permentan/OT.140/5/2013 mengenai Organisasi dan Tata Kerja berganti nama menjadi Balai Veteriner (B-Vet) Bukittinggi yang mempunyai wilayah kerja 4 Provinsi yaitu : Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kep. Riau. Balai Veteriner Bukittinggi adalah unit pelaksana teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen .Entitas berkedudukan di Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh Km. 14. Po Box 35 Bukittinggi.

Balai Veteriner terdiri dari beberapa Laboratorium yang berperan khusus dalam penyidikan dan pengujian kesehatan hewan diwilayah regionalnya di Indonesia. Balai Veteriner Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Veteriner Bukittinggi berkomitmen dengan visi ***“melalui Penyidikan dan Pengujian Veteriner yang modern, mewujudkan Regional II terjamin aman kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinerinya...***

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner

Regional II Bukittinggi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Administrasi dan penegakan Hukum	1.099.000.000	1.099.000.000
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	1.000.000	1.000.000
Jumlah Pendapatan	1.100.000.000	1.100.000.000
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.727.331.000	4.727.331.000
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	60.944.000	64.198.000
Belanja Lembur	89.076.000	85.822.000
Belanja Barang Operasional	1.363.380.000	1.509.329.000
Belanja Barang Non Operasional	1.983.134.000	328.784.000
Belanja Barang Persediaan	11.987.653.000	116.408.000
Belanja Jasa	2.373.903.000	903.108.000
Belanja Pemeliharaan	1.678.211.000	1.474.996.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.285.497.000	437.600.000
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2.133.900.000	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.223.880.000	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.039.000.000	-
Jumlah Belanja	40.945.909.000	9.647.576.000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 436.501.512,00 atau mencapai 39,68% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.100.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	7.100.731	-
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	1.099.000.000	413.865.100	37,66
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	1.000.000	5.400.000	540,00
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Pendapatan Denda	-	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	10.135.681	-
Jumlah	1.100.000.000	436.501.512	39,68

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 25.66% dibandingkan TA 2023. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

NO.	Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	% Real Angg.
1	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	1.800.731	2.052.552	-13,98
2	Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi	5.300.000	3.300.000	37,74
3	pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya	413.865.100	325.637.000	21,32
4	Pendapatan pengembangan sumber daya manusia lainnya	-	8.200.000	0,00
5	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	5.400.000	560.000	89,63
6	pendapatan jasa pengawasan/pemeriksaan	-	1.570.000	0,00
7	pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	-	167.304	-100,00
8	penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	1.200.000	5.892.150	-79,63
9	penerimaan kembali belanja barang TAYL	8.935.681	-	0,00
	Jumlah	436.501.512	347.379.006	25,66

Keterangan :

- Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berasal dari sewa rumah dinas 19 unit yang pembayaran di potong langsung dari gaji induk pegawai.
- Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi berupa Sewa Asrama dan Aula
- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya berupa jasa pemeriksaan sampel dari aplikasi/pengguna jasa.
- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan berasal dari biaya magang mahasiswa / pihak ketiga.
- Penerimaan kembali Belanja Pegawai TA yang Lalu berupa Pengembalian kelebihan Uang makan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.200.000.
- Penerimaan kembali Belanja Barang TA yang Lalu berupa pengembalian honor PPNN yang sudah jadi P3K sebesar Rp 1.972.575 dan penyelesaian tuntutan ganti rugi atas belanja barang oleh CV. Global Edukasi Nusantara untuk kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan Laboratorium, yang lebih bayar sebesar Rp 6.963.106.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp 4.331.752.689,00 atau 44.90% dari anggaran belanja sebesar Rp 9.647.576.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
30 Juni 2024

Uraian akun Belanja	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.877.351.000	2.647.852.065	54,29
Belanja Barang	4.770.225.000	1.683.901.999	35,30
Belanja Modal	-	-	-
Total belanja Kantor	9.647.576.000	4.331.754.064	44,90
Pengembalian Belanja	-	(1.375)	-
Total belanja bersih	9.647.576.000	4.331.752.689	44,90

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar – 30.99% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain pada Tahun Anggaran 2024 sampai bulan Juni tidak terdapat anggaran belanja Modal.

Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.647.852.065	2.531.194.252	4,61
Belanja Barang	1.683.901.999	3.644.612.636	(53,80)
Belanja Modal	0	101.010.000	100,00
Jumlah	4.331.754.064	6.276.816.888	(30,99)

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.647.850.690,00 dan Rp2.531.194.252,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,61% dari TA 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.523.276.749	2.509.557.134	0,55
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	93.305.316	21.637.000	331,23
Belanja Lembur	31.270.000	0	
Jumlah Belanja kotor	2.647.852.065	2.531.194.134	4,61
Pengembalian Belanja Pegawai	1.375	118	1.065,25
Jumlah Belanja bersih	2.647.850.690	2.531.194.252	4,61

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.683.901.999,00 dan Rp 3.644.612.636,00. Realisasi belanja barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar -53,80% dari TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Pagu TA 2024 lebih kecil dari Pagu TA 2023, sehingga belanja persediaan sedikit dan tidak terdapat belanja modal.

Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	581.347.468	500.890.350	16,06
Belanja Barang Non Operasional	71.417.600	204.643.856	(65,10)
Belanja Barang Persediaan	59.159.810	1.164.512.330	(94,92)
Belanja Jasa	411.397.038	415.557.801	(1,00)
Belanja Pemeliharaan	476.500.463	345.951.080	37,74
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	84.079.620	1.013.057.219	(91,70)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	-
Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	1.683.901.999	3.644.612.636	(53,80)
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	1.683.901.999	3.644.612.636	(53,80)

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 101.010.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapat pagu belanja modal pada TA 2024.

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	101.010.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	101.010.000,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	101.010.000,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp142.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP Rupiah Murni Rp.120.000.000,00 dan UP PNBPNP Rp.22.000.000,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024

Uraian	30 Juni 2024
Kas Di Bendahara Pengeluaran berupa UP Rupiah Murni	120.000.000,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran berupa UP PNBPNP	22.000.000,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	142.000.000,00

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp299.944,00 dan Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan jenis aset dalam bentuk pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan rumah dinas yang di potong langsung dari gaji pegawai bulan Juli 2024. Piutang Bukan Pajak dikarenakan pembuatan SPP gaji bulan Juli 2024 dibuat bulan Juni dan pemotongan dilakukan saat terbit SP2D pada tanggal 1 Juli 2024. Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Piutang Bukan Pajak	299.944,00	0,00
Jumlah	299.944,00	0,00

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp221.398.760,00 dan Rp883.335.354,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk

dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN PERSEDIAAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Barang Konsumsi	46.711.613	289.236.503	(83,85)
Bahan untuk Pemeliharaan	1.150.800	4.302.100	(73,25)
Suku Cadang	76.332.762	126.009.912	(39,42)
Bahan Baku	97.203.585	463.786.839	(79,04)
Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	221.398.760	883.335.354	(74,94)

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22.829.600.000,00 dan Rp22.829.600.000,00.

No	Nama Barang	Kepemilikan	Nilai Buku	jml (m2)	No. PSP
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	862.073.000	1.421	140/KM.6/WKN.03 /KNL.02/2020 Tgl 08/12/2020
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	676.080.000	1.200	140/KM.6/WKN.03 /KNL.02/2020 Tgl 08/12/2020
3	Tanah Bangunan Mess/ Wisma/ Asrama	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	1.101.447.000	1.955	140/KM.6/WKN.03 /KNL.02/2020 Tgl 08/12/2020
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	20.190.000.000	45.000	140/KM.6/WKN.03 /KNL.02/2020 Tgl 08/12/2020
		TOTAL	22.829.600.000		

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp46.150.034.207,00 dan Rp44.593.145.318,00.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.315.877.500,00 dan Rp11.315.877.500,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp903.834.150,00 dan Rp903.834.150,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp80.232.500,00 dan Rp80.232.500,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp -45.682.625.911,00 dan Rp-43.730.707.556,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Aset Tetap Lainnya	Nilai perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	46.150.034.207	(40.613.107.235)	5.536.926.972
2	Gedung dan Bangunan	11.315.877.500	(4.641.291.192)	6.674.586.308
3	Jalan, Irigasi dan jaringan	903.834.150	(428.227.484)	475.606.666
4	Aset Tetap Lainnya	80.232.500	-	80.232.500
Akumulasi penyusutan		58.449.978.357	(45.682.625.911)	12.767.352.446

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.115.000,00 dan Rp6.115.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berbentuk Software **Aplikasi Isikhnas**.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.115.000,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.651.000,00 dan Rp1.651.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) berupa Sumur Artesis dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-6.757.055,00 dan Rp-6.711.194,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	-6.115.000,00	0,00
2.	Aset Lain-lain	1.651.000,00	-642.055,00	1.011.945,00
	Akumulasi Penyusutan	7.766.000,00	-6.757.055,00	1.011.945,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp142.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.4.2. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan Desember 2023 adalah masing – masing sebesar Rp 355.467.266,00 dan Rp 0,00. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan SPM Gaji induk PNS dan PPPK bulan Juli 2024 sebesar Rp.300.767,266,00 dan SPM Gaji PPNPN bulan Juli 2024 sebesar Rp. 50.000.000,00 dan THR THL Pusat 2 orang sebesar Rp 4.700.000,00

C.4.3. Utang Yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan Desember 2023 adalah Rp105.527.400,00 dan Rp 0,00. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kuitansi-kuitansi belanja yang belum di GUP, namun pembayaran sudah diinput dimodul komitmen.

C.5. EKUITAS

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 35.358.665.429,00 dan Rp36.876.372.072,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp341.828.948,00 dan Rp657.700.961,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2024

NO.	Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	% Real Angg.
1	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	2.100.675	2.394.644	-13,99
2	Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi	5.300.000	3.300.000	37,74
3	pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standarisasi lainnya	413.865.100	325.637.000	21,32
4	Pendapatan pengembangan sumber daya manusia lainnya	-	8.200.000	0,00
5	pendapatan hasil penelitian/riset dan hasil pengembangan iptek	5.400.000	560.000	89,63
6	pendapatan jasa pengawasan/pemeriksaan	-	1.570.000	0,00
7	pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	-	167.304	-100,00
	Jumlah	426.665.775	341.828.948	24,82

Pendapatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan 24,82% dari tahun sebelumnya. Hal ini karena Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi dan pendapatan hasil penelitian riset dan hasil pengembangan iptek mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada Laporan Operasional jumlah PNBPN pada pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan terhitung akrual Rp.299.944,00 potongan sewa rumah dinas yang berasal dari gaji pegawai bulan Juli.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.948.617.956,00 dan Rp Rp2.814.046.434,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.956.742.600,00	1.957.846.258,00	-0,06
Beban Pembulatan Gaji PNS	29.376,00	30.567,00	-3,90
Beban Tunj. Anak PNS	47.367.670,00	45.391.184,00	4,35
Beban Tunj. Beras PNS	107.181.600,00	111.744.060,00	-4,08
Beban Tunj. Fungsional PNS	281.280.000,00	298.650.000,00	-5,82
Beban Tunj. PPh PNS	45.031.091,00	19.541.895,00	130,43
Beban Tunj. Struktural PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	149.174.900,00	150.299.470,00	-0,75
Beban Tunjangan Umum PNS	31.340.000,00	31.465.000,00	-0,40
Beban Uang Lembur	30.576.000,00	21.637.000,00	41,31
Beban Uang Makan PNS	179.155.000,00	161.241.000,00	11,11
Beban Gaji Pokok PPPK	78.384.600,00	0	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.649,00	0	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	2.260.350,00	0	0,00
Beban Tunj. Fungsional PPPK	10.800.000,00	0	0,00
Beban Tunj. Beras PPPK	2.607.120,00	0	0,00
Beban Uang Makan PPPK	9.702.000,00	0	0,00
Beban Uang Lembur PPPK	694.000,00	0	0,00
Jumlah	Rp2.948.527.956,00	Rp2.814.046.434,00	4,78

Perbandingan beban Pegawai lebih besar per Juni 2024 jika dibandingkan per Juni 2023 karena adanya pengangkatan PPPK sebanyak 3 orang dan kenaikan pangkat dan golongan.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 668.671.954,00 dan Rp 2.196.965.297,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	387.498.329,00	1.853.981.027,00	-79,10
Beban Persediaan konsumsi	281.173.625,00	334.052.270,00	-15,83
Beban persediaan lainnya	0	8.932.000,00	-100,00
Jumlah	668.671.954,00	2.196.965.297,00	-69,56

Persediaan Bahan baku berupa bahan dan peralatan pengujian laboratorium. Persediaan konsumsi berupa bahan keperluan sehari – hari perkantoran. Beban persediaan Lainnya berupa pengadaan alat dan bahan penunjang laboratorium.

Beban persediaan mengalami penurunan sebesar 69.56% dikarenakan PAGU belanja barang persediaan lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.126.306.006,00 dan Rp1.175.478.377,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Beban Bahan	325.000,00	68.485.394,00	-99,53
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	71.092.600,00	141.028.462,00	-49,59
Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	62.850.000,00	72.850.000,00	-13,73
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	52.575.400,00	23.299.493,00	125,65
Beban Jasa Profesi	28.050.000,00	21.900.000,00	28,08
Beban Keperluan Perkantoran	552.276.291,00	477.093.620,00	15,76
Beban Langganan Air	0,00	-301.900,00	-100,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	65.060.302,00	66.322.950,00	-1,90
Beban Langganan Listrik	264.518.288,00	276.478.860,00	-4,33
Beban Langganan Telepon	1.798.048,00	1.961.498,00	-8,33
Beban Honor Output Kegiatan	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa	0,00	26.360.000,00	-100,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	20.471.000,00	0,00	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.289.077,00	0,00	0,00
Jumlah	1.126.306.006,00	1.175.478.377,00	-4,18

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp626.628.413,00 dan Rp586.077.075,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	252.518.524,00	69.050.345,00	265,70
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	252.602.014,00	285.698.750,00	-11,58
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.151.300,00	12.803.750,00	-75,39
Beban Persediaan Suku Cadang	49.677.150,00	218.524.230,00	-77,27
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	56.695.725,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	11.983.700,00	0	0,00
Jumlah	626.628.413,00	586.077.075,00	6,92

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp84.459.620,00 dan Rp1.109.032.405,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	52.525.537,00	803.392.894,00	-93,46
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	1.350.000,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31.934.083,00	298.984.511,00	-89,32
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	5.305.000,00	-100,00
Jumlah	84.459.620,00	1.109.032.405,00	-92,38

D.7. Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 2.587.500,00. Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat adalah merupakan beban untuk mencatat barang fisik berupa ternak sapi, kambing/domba dan ayam yang diberikan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Rincian Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	2.587.500,00	0,00
Jumlah	0,00	2.587.500,00	0,00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.484.897.549,00 dan Rp1.505.882.681,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	332.304.871,00	331.306.952,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	5.415.592,00	5.415.592,00	0,00

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.688.000,00	10.865.749,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	7.196.641,00	7.196.640,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	45.861,00	45.861,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.138.246.584,00	1.151.051.887,00	-13,56
Jumlah	1.484.897.549,00	1.505.882.681,00	-10,71

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	0,00	0,00	-0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	-100,00

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.200.000,00	5.892.150,00	2003,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8.935.681,00	0,00	-100,00
Jumlah	10.135.681,00	5.892.150,00	2003,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 36.876.372.072,00 dan Rp 40.686.074.071,00

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp -6.502.780.042,00 dan Rp-9.042.348.671,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.985.073.399,00 dan Rp5.929.437.764,00 Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2024.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 Juni 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.331.752.689,00

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 Juni 2024
Diterima dari Entitas Lain	- 436.501.512,00
Transfer Masuk	1.089.822.222,00
Transfer Keluar	0,00
Jumlah	4.985.073.399,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 30 Juni 2024 saldo DDEL adalah sebesar Rp-436.501.512,00 sedangkan DKEL sebesar Rp4.331.752.689,00.

E.4.2. Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan peindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar 1.089.822.222 terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Cold Room (1 Unit)	DITJEN PKH	Rp1.089.822.222
-	-	-
Jumlah		Rp1.089.822.222

Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar 0,00 terdiri dari :

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	0,00
-	-	-
Jumlah		0,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp36.843.562.978,00 dan Rp37.573.163.164,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

a. DAFTAR RINCIAN REVISI DIPA TAHUN ANGGARAN 2024

SATKER	NOMOR DIPA	DIGITAL STEMP	TGL.REVISI DIPA	ANGGARAN	KET
239523	SP DIPA-018.06.2.239523/2024	DS:7962-5635-2456-5020	24 November 2023	Rp.40.945.909.000	DIPA AWAL
	SP DIPA-018.06.2.239523/2024 Revisi I	DS:7104-0052-3090-5100	05 Januari 2024	Rp. 9.647.576.000	Refocusing Anggaran
	SP DIPA-018.06.2.239523/2024 Revisi II	DS:2000-5517-2798-1910	23 Januari 2024	Rp. 9.647.576.000	Pergeseran Anggaran
	SP DIPA-018.06.2.239523/2024 Revisi III	DS:2000-5517-2798-1910	30 Januari 2024	Rp. 9.647.576.000	Pemutakhiran hal. 3 DIPA
	SP DIPA-018.06.2.239523/2024 Revisi IV	DS:2000-5517-2798-1910	24 Maret 2024	Rp. 9.647.576.000	Pemutakhiran hal. 3 DIPA
	SP DIPA-018.06.2.239523/2024 Revisi V	DS:2000-5517-2798-1910	22 April 2024	Rp. 9.647.576.000	Pemutakhiran hal. 3 DIPA
	SP DIPA-018.06.2.239523/2024 Revisi VI	DS:2000-5517-2798-1910	02 Juni 2024	Rp. 9.647.576.000	Pemutakhiran hal. 3 DIPA

b. PENJELASAN ATAS KOREKSI / PERBAIKAN DARI HASIL REVIU